



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a bahwa ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek manajemen pemerintahan;
- b bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, dalam huruf E angka 2 menyatakan tugas Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menyusun dokumen usulan dan Rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi serta menetapkan road map dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistik, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun 2010 – 2025.
8. Road Map adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat adalah Tim yang dibentuk untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan, memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai dokumen rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi arah pada pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dari Tahun 2019 – 2023.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III
SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Ringkasan Eksekutif;
 - b. Pendahuluan;
 - c. Gambaran Umum Birokrasi;
 - d. Agenda Reformasi Birokrasi;
 - e. Monitoring dan Evaluasi;
 - f. Penutup; dan
 - g. Lampiran.
- (2) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.





BAB IV
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) area perubahan yang meliputi :
- a. Penataan Organisasi;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - e. Penguatan Pengawasan;
 - f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - h. Perubahan Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*).

Pasal 6

Pelaksanaan reformasi Birokrasi pada Tahun 2019 – 2023 diprioritaskan pada pelayanan publik sebagai *quick wins* Reformasi Birokrasi di daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
			

**BAB V
PENGORGANISASIAN**

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan reformasi.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB VI
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, setiap kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2019

↑ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 104

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan. Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat ini disusun mempedomani pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2009-2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan yang memuat tahapan secara sistematis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Road Map Reformasi Birokrasi ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah strategis dan berbagai agenda yang akan dijalankan terkait dengan pembenahan birokrasi dalam rangka mewujudkan sasaran program pembangunan jangka panjang dan menengah daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari bahwa Road Map Reformasi Birokrasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, semua saran dan masukan akan diterima guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga road map ini dapat bermanfaat sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Desember 2019

 **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,** 


H. SUTARMIDJI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
DAFTAR TABEL	iv-vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	I-XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Dasar Hukum	2
2. Maksud dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM BIROKRASI.....	5
A. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat	5
B. Pencapaian	7
C. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	10
D. Permasalahan	13
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI.....	16
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi.....	16
1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi.....	16
a. Sumber Daya Manusia.....	16
b. Pengawasan.....	16
c. Pelayanan Publik.....	17
2. Prioritas yang harus terus dipelihara	19
3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan.....	22
1) Pendidikan	22
2) Kesehatan	22
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Kurupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.....	24

5. Prioritas SKPD.....	24
B. Sasaran Reformasi Birokrasi	24
1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	24
a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	24
b. Peningkatan Pengawasan	25
c. Peningkatan Pelayanan Publik	26
2. Prioritas yang harus terus dipelihara	28
3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan kualitas Pelayanan.....	42
4. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	46
5. Prioritas SKPD.....	46
C. Kegiatan-Kegiatan	46
1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	46
a. SDM	46
b. Pengawasan.....	47
c. Pelayanan Publik	48
2. Prioritas yang harus terus dipelihara	49
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan	63
4. Prioritas SKPD.....	71
D. Rencana Aksi	71
Lampiran	72-154
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	155
a. Monitoring.....	155
b. Evaluasi	157
BAB V PENUTUP.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Sasaran Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	24
2.	Sasaran Peningkatan Pengawasan.....	25
3.	Sasaran Pelayanan Publik	26
4.	Sasaran Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas pada Provinsi Kalimantan Barat.....	28
5.	Sasaran Sosialisasi dan Internalisasi Anti Korupsi terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pembentukan Agent Of Change	29
6.	Sasaran Penyusunan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	29
7.	Sasaran Harmonisasi Produk Hukum sudah dan terus dilaksanakan..	30
8.	Sasaran Pelatihan untuk peningkatan kualitas APiP.....	30
9.	Sasaran Peningkatan APiP	30
10.	Sasaran Penerapan SPIP.....	31
11.	Sasaran Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	31
12.	Sasaran Transparansi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	32
13.	Sasaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan menggunakan e-procurement dan e-catalog	32
14.	Sasaran tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi	33
15.	Sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis aplikasi ...	33
16.	Sasaran peningkatan indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	33

17.	Sasaran penerapan inovasi dalam pelayanan publik	34
18.	Sasaran penyusunan Peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik .	34
19.	Sasaran pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik	34
20.	Sasaran Penetapan PPID Utama dan PPID Pembantu	35
21.	Sasaran peningkatan rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat	35
22.	Sasaran peningkatan urusan penataan ruang	35
23.	Sasaran peningkatan pelayanan ketenagalistrikan	36
24.	Sasaran peningkatan jalan dan jembatan status Provinsi	36
25.	Sasaran peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	37
26.	Sasaran pemberian beasiswa pada siswa berprestasi	37
27.	Sasaran Peningkatan fasilitas perhubungan.....	37
28.	Sasaran penataan kelembagaan/organisasi	38
29.	Sasaran peningkatan indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar	38
30.	Sasaran peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan	39
31.	Sasaran penatausahaan Barang Milik Daerah.....	39
32.	Sasaran Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan	39
33.	Sasaran penyusunan sistem pengembangan kompetensi ASN dan penilaian kinerja ASN	40
34.	Sasaran penetapan dan penerapan kode etik ASN	40
35.	Sasaran Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi.....	40
36.	Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan....	41
37.	Sasaran peningkatan kompetensi guru.....	42
38.	Sasaran penyediaan kualitas penunjang pendidikan	42

39.	Sasaran peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.....	42
40.	Sasaran peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak	43
41.	Sasaran peningkatan layanan kesehatan perempuan	43
42.	Sasaran deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular	44
43.	Sasaran pelayanan puskesmas diluar gedung	44
44.	Sasaran pelayanan perizinan.....	44
45.	Sasaran perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program beasiswa siswa miskin SMA/SMK	45
46.	Sasaran peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.....	45
47.	Zona integritas menuju WBK/WBBM	46

Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor Tahun 2019
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 - 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2019 – 2023. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan menciptakan pelayanan publik yang prima.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum

birokrasi saat ini di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi salah satunya dengan adanya Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta disaksikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
2. Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan *agent of change* (agen perubahan);
3. Tidak hanya jabatan Pimpinan Tinggi, namun jabatan Administrator, dan Pengawas diwajibkan menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
4. Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan;
5. Inspektorat telah dilakukan penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP;
6. Kebutuhan jumlah APIP yang mulai memadai dengan pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian;
7. SPIP sudah mulai diterapkan;
8. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanaann dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD;
9. Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar;
10. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3;

11. Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi;

Dalam kaitan dengan birokrasi yang kapabel, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar memperoleh predikat B. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang dapat mengukur kinerja perangkat daerah. Alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id;
3. Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP;
4. Kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat, dimana pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%.
5. Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat;
6. Menyusun Sistem pengembangan kompetensi ASN dan melakukan penilaian kinerja ASN setahun sekali dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2018 memperoleh kategori sedang;
7. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik ASN;
8. Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi;
9. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah.

Sementara dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai Menciptakan Pelayanan Publik Yang Prima, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan publik;
2. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah 2,65 yang telah dinilai secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun untuk hasil penilaian dari

Kementerian PAN dan RB yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2019;

3. Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan publik;
4. Tersedianya peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik;
5. Terselenggaranya pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik;
6. PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah telah ditetapkan untuk menjamin keterbukaan publik;
7. Prosentase rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pertahunnya;
8. Pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi;
9. Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat dapat dilaksanakan dan Penguatan komitmen pimpinan dari level tertinggi hingga terendah di dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Menguatnya integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi dan penguatan *agent of change* (agen perubahan);
3. Seluruh jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan administrator, dan Pengawas menyusun LHKPN dan menyampaikannya ke KPK;
4. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan;

5. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal (APIP);
7. Penguatan SPIP di setiap perangkat daerah;
8. Penguatan partisipasi publik pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
9. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan;
10. Terwujudnya UKPBJ Center of Excelent (CoE) Level 5;
11. Meningkatnya sarana dan prasarana pengaduan masyarakat dan optimalisasi penggunaan aplikasi Lapor SP4N.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan mewujudkan birokrasi yang kapabel adalah sebagai berikut:

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
2. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan target predikat nilai SAKIP A;
3. Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WTP;
4. Peningkatan pengelolaan aset Provinsi Kalimantan Barat;
5. Terwujudnya anggaran berbasis kinerja/tata kelola keuangan yang baik;
6. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit dengan penilaian indeks profesionalisme ASN kategori baik dan diterapkannya TPP berbasis kinerja;
7. Komitmen dan konsistensi penegakan disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran dan pemberian reward yang jelas terhadap ASN;
8. Meningkatnya kepemimpinan yang transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi
9. Meningkatnya tata kelola kearsipan dengan indeks kearsipan tinggi.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan menciptakan pelayanan publik yang prima, antara lain:

1. Terintegrasinya sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan e-government Pemprov. Kalbar sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing;
2. Indeks SPBE Pemprov Kalbar mendapat predikat nilai A;
3. Meningkatnya inovasi baru dan pengembangannya dalam pelayanan publik;
4. Terciptanya proses bisnis dan SOP yang sederhana, mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat;
6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam pelayanan publik;
7. Pembangunan dan pemerataan fasilitas umum dan sosial lebih diperkuat terutama di wilayah terpencil;
8. Peningkatan tata ruang agar tepat fungsi sehingga ruang publik tidak terabaikan seperti sarana taman kota, olahraga dan ibadah;
9. Ketersediaan energi yang memadai dan optimalisasi pengelolaan energi terbarukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat;
10. Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
11. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan;
12. Peningkatan pelayanan di bidang Pendidikan;
13. Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu;
14. Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Komitmen bersama dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi belum optimal;
2. Integritas dan budaya anti korupsi serta agent of change yang sudah terbentuk belum optimal;
3. Masih terdapat ASN yang terlambat dan tidak menyampaikan LHKPN;

4. Masih terdapat produk hukum yang belum diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru;
5. Kelembagaan inspektorat yang kurang independen, kualitas APIP dan koordinasi antar lembaga/unit kerja yang belum optimal;
6. Peran aparat APIP yang belum optimal;
7. Belum optimalnya penerapan sistem pengawasan dan pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah;
8. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
9. Transparansi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal;
10. UKPBJ Pemprov Kalbar belum optimal;
11. Pengelolaan sarana pengaduan belum optimal.

Sementara dalam kaitan dengan mewujudkan birokrasi kapabel, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan secara menyeluruh sehingga masih terdapat struktur yang kurang efisien;
2. Perencanaan yang belum sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, pelaksanaan, pengukuran, pengawasan dan pelaporan AKIP belum optimal;
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
4. Belum optimalnya pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Masih terdapat inefisiensi anggaran karena tidak sesuai dengan output yang dihasilkan;
6. Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan kesejahteraan ASN;
7. Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan secara optimal;
8. Perubahan Mindset dan culture set pada level pimpinan sebagai role model belum optimal;
9. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan daerah.

Dalam kaitan dengan menciptakan pelayanan publik yang prima, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Penerapan e-government belum sepenuhnya terlaksana;
2. kebijakan, tata kelola dan pelayanan yang belum optimal;
3. Belum optimalnya inovasi yang dikembangkan dalam pelayanan publik;
4. Peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik masih belum efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja, serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan baik sarana teknologi maupun informasi;
6. PPID Pembantu belum optimal melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan menyampaikan dokumen/informasi;
7. Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
8. Belum optimalnya penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat;
9. Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik;
10. Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan;
11. Belum tuntasnya pembangunan jalan parallel perbatasan dan akses parallel perbatasan;
12. Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar, serta belum terealisasinya pembangunan fly over di Kota Pontianak;
13. Belum semua kawasan strategis/kawasan industri/kawasan ekonomi khusus maupun pusat kegiatan nasional yang dapat didukung dengan akses jalan;
14. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
15. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat difokuskan pada 3 (tiga) fokus area perubahan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Kuantitas dan kompetensi (attitude) pegawai belum optimal dalam mendukung organisasi berkinerja tinggi
- b) Peningkatan kompetensi ASN berdasarkan standar kompetensi dan persyaratan jabatan belum sepenuhnya diterapkan;
- c) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- d) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai masih rendah.

2) Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- b) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- c) Masih terdapat ASN yang terlambat dan tidak menyampaikan LHKPN.

3) Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

a. Pelayanan Administratif

- a) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan daerah;

- b) Penerapan teknologi informasi di pemerintahan masih bersifat parsial, belum terdapat integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien;
- c) Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai.

b. Pelayanan Barang

- a) Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik;
- b) Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan.

c. Pelayanan Jasa

- a) Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas relatif masih rendah;
- b) Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dasar di wilayah-wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi;
- d) Akses infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi;
- e) Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
- f) Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
- g) Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar, serta belum terealisasinya pembangunan fly over di Kota Pontianak;
- h) Lemahnya proses pembangunan rel kereta api, sedangkan FS dan DED nya sudah tersedia;
- i) Kualitas dan kuantitas sarana sosial di Kalimantan Barat belum maksimal;

- j) Angka melek aksara di Kalimantan Barat masih relatif kecil;
- k) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknologi informasi komunikasi.

d. Pelayanan Regulatif

- a) Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara;
- b) Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Mempertahankan komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi salah satunya dengan adanya Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta disaksikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

- 2) Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of change;
- 3) Tidak hanya jabatan Pimpinan Tinggi, namun jabatan Administrator, dan Pengawas diwajibkan menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 4) Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan;
- 5) Inspektorat telah dilakukan penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP;
- 6) Kebutuhan jumlah APIP yang mulai memadai dengan pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian;
- 7) SPIP sudah mulai diterapkan;
- 8) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanann dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD;
- 9) Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar;
- 10) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3;
- 11) Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi;
- 12) Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan publik;
- 13) Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah 2,65 yang telah dinilai secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun untuk hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2019;
- 14) Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan public;

- 15) Tersedianya peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik
- 16) Terselenggaranya pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan public;
- 17) PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah telah ditetapkan untuk menjamin keterbukaan publik;
- 18) Prosentase rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pertahunnya;
- 19) Urusan penataan ruang mengalami peningkatan sebesar 29,24 persen pada tahun 2017, dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 28,73 persen;
- 20) Pelayanan ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 5,34% dibanding tahun sebelumnya;
- 21) Pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi;
- 22) Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 23) Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi;
- 24) Fasilitas perhubungan sudah mulai dibangun;
- 25) Telah dilakukan penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah;
- 26) Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar memperoleh predikat B. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang dapat mengukur kinerja perangkat daerah. Alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id;
- 27) Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP;
- 28) Kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat, dimana pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%.
- 29) Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat;
- 30) Menyusun Sistem pengembangan kompetensi ASN dan melakukan penilaian kinerja ASN setahun sekali dan Indeks

Profesionalisme ASN Tahun 2018 memperoleh kategori sedang;

- 31) Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik ASN;
- 32) Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi;
- 33) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Beranjak dari hal tersebut, maka dalam sektor ini, ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

- a. Peningkatan kualitas guru sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- b. Peningkatan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu;
- c. Penyediaan kualitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, buku, taman bacaan, sarana dan prasarana olah raga;
- d. Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online.

2) Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang

prima. Dalam sektor pelayanan kesehatan, yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. Peningkatan Layanan Kesehatan Perempuan (deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara);
- d. Deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya selama 5 (lima) tahun kedepan dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga dapat diterapkan, dan masyarakat akan merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diambil Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, juga menjadi unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. Inspektorat dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

e. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2019 – 2023. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

Dengan mengusung visi pembangunan Kalimantan Barat 2019-2023 untuk mewujudkan **“KESEJAHRTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**, maka dibutuhkan adanya suatu birokrasi yang profesional dan berkarakter. Untuk itu, reformasi birokrasi adalah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dalam rangka mewujudkan suatu program reformasi birokrasi yang terencana, terpadu dan terukur maka diperlukan suatu Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan itu, maka penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2009-2014.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menjabarkan Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, Road Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya (RPJPD/RPJMD).
- b. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kata lain, Road Map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Road Map menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Secara spesifik tujuan penyusunan Road Map reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu :

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, yang berfokus mewujudkan sasaran perubahan berikut ini :
 - 1) Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi;
 - 2) Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
 - 3) Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial;
 - 4) Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - 5) Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan;
 - 6) Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Birokrasi Yang Kapabel, yang berfokus mewujudkan sasaran perubahan berikut ini :
 - 1) Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
 - 2) Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
 - 4) Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
- c. Menciptakan Pelayanan Publik Yang Prima, yang berfokus mewujudkan sasaran perubahan berikut ini :
 - 1) Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
 - 2) Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

BAB II
GAMBARAN UMUM BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat

Beranjak dari kondisi *existing* geografis wilayah, demografi dan sosial, potensi yang dimiliki, kemampuan perekonomian daerah dan isu aktual yang berkembang di masyarakat serta arus proses perubahan sistem dan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah yang sangat dinamis, maka Visi Provinsi Kalimantan Barat saat ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**. Untuk mewujudkan misi tersebut, ada 6 (enam) misi yang telah ditetapkan, yakni:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur

Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Visi dan misi yang dicanangkan era kepemimpinan Gubernur H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. 2018 – 2023 untuk yang pertama kalinya merupakan acuan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019-2023 sehingga diharapkan rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan optimal. Dalam Bab ini, akan mengkonsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi

birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menjelaskan pencapaian yang telah dilakukan, rencana yang akan dilakukan, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab dan rencana anggaran.

B. Pencapaian

Tim Kerja Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari SKPD yang terkait telah melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* sejak Bulan Oktober sampai Desember 2019 dalam rangka penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan menciptakan pelayanan publik yang prima

Selanjutnya, dalam FGD tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan terkait dengan hal-hal yang telah dicapai, problematika birokrasi Provinsi Kalimantan Barat, serta harapan pemangku kepentingan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi salah satunya dengan adanya Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta disaksikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan

Tinggi Kalimantan Barat dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

2. Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of change;
3. Tidak hanya jabatan Pimpinan Tinggi, namun jabatan Administrator, dan Pengawas diwajibkan menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
4. Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan;
5. Inspektorat telah dilakukan penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP;
6. Kebutuhan jumlah APIP yang mulai memadai dengan pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian;
7. SPIP sudah mulai diterapkan;
8. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanaann dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD;
9. Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar;
10. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3;
11. Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi.

Dalam kaitan dengan mewujudkan birokrasi yang kapabel, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah;

2. Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar memperoleh predikat B. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang dapat mengukur kinerja perangkat daerah. Alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id;
3. Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP;
4. Kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat, dimana pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%.
5. Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat;
6. Menyusun Sistem pengembangan kompetensi ASN dan melakukan penilaian kinerja ASN setahun sekali dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2018 memperoleh kategori sedang;
7. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik ASN;
8. Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi;
9. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah

Sementara dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai menciptakan pelayanan publik yang prima, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan publik;
2. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 2,55 yang telah dinilai secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun utk hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB belum ditetapkan;
3. Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan publik;
4. Tersedianya peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik;

5. Terselenggaranya pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik;
6. PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah telah ditetapkan untuk menjamin keterbukaan publik;
7. Prosentase rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pertahunnya;
8. Urusan penataan ruang mengalami peningkatan sebesar 29,24 persen pada tahun 2017, dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 28,73 persen;
9. Pelayanan ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 5,34% dibanding tahun sebelumnya;
10. Pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi;
11. Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

C. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat dapat dilaksanakan dan Penguatan komitmen pimpinan dari level tertinggi hingga terendah di dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi;

2. Menguatnya integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi dan penguatan agent of change;
3. Seluruh jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan Pengawas menyusun LHKPN dan menyampaikannya ke KPK;
4. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal (APIP);
7. Penguatan SPIP di setiap perangkat daerah;
8. Penguatan partisipasi publik pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
9. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan;
10. Terwujudnya UKPBJ Center of Excelent (CoE) Level 5;
11. Meningkatnya sarana dan prasarana pengaduan masyarakat dan optimalisasi penggunaan aplikasi Lapor SP4N.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan mewujudkan birokrasi yang kapabel adalah sebagai berikut:

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
2. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan target predikat nilai SAKIP A;
3. Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WTP;
4. Peningkatan pengelolaan aset Provinsi Kalimantan Barat;
5. Terwujudnya anggaran berbasis kinerja/tata kelola keuangan yang baik;
6. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit dengan penilaian indeks profesionalisme ASN kategori baik dan diterapkannya TPP berbasis kinerja;

7. Komitmen dan konsistensi penegakan disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran dan pemberian reward yang jelas terhadap ASN;
8. Meningkatnya kepemimpinan yang transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi
9. Meningkatnya tata kelola kearsipan dengan indeks kearsipan tinggi

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan menciptakan pelayanan publik yang prima, antara lain:

1. Terintegrasinya sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan e-government Pemprov. Kalbar sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing;
2. Indeks SPBE Pemprov Kalbar mendapat predikat nilai A;
3. Meningkatnya inovasi baru dan pengembangannya dalam pelayanan publik;
4. Terciptanya proses bisnis dan SOP yang sederhana, mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat;
6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam pelayanan public;
7. Pembangunan dan pemerataan fasilitas umum dan sosial lebih diperkuat terutama di wilayah terpencil;
8. Peningkatan tata ruang agar tepat fungsi sehingga ruang publik tidak terabaikan seperti sarana taman kota, olahraga dan ibadah;
9. Ketersediaan energi yang memadai dan optimalisasi pengelolaan energi terbarukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat;
10. Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
11. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan;
12. Peningkatan pelayanan di bidang Pendidikan;
13. Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu;

14. Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan.

D. Permasalahan

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Komitmen bersama dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi belum optimal;
2. Integritas dan budaya anti korupsi serta agent of change yang sudah terbentuk belum optimal;
3. Masih terdapat ASN yang terlambat dan tidak menyampaikan LHKPN;
4. Masih terdapat produk hukum yang belum diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru;
5. Kelembagan inspektorat yang kurang independen, kualitas APIP dan koordinasi antar lembaga/unit kerja yang belum optimal;
6. Peran aparat APIP yang belum optimal;
7. Belum optimalnya penerapan sistem pengawasan dan pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah;
8. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
9. Transparansi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal;
10. UKPBJ Pemprov Kalbar belum optimal;
11. Pengelolaan sarana pengaduan belum optimal.

Sementara dalam kaitan dengan mewujudkan birokrasi yang kapabel, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan secara menyeluruh sehingga masih terdapat struktur yang kurang efisien;

2. Perencanaan yang belum sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, pelaksanaan, pengukuran, pengawasan dan pelaporan AKIP belum optimal;
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
4. Belum optimalnya pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Masih terdapat inefisiensi anggaran karena tidak sesuai dengan output yang dihasilkan;
6. Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan kesejahteraan ASN;
7. Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan secara optimal;
8. Perubahan *Mindset* dan *culture set* pada level pimpinan sebagai role model belum optimal;
9. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan daerah.

Dalam kaitan dengan menciptakan pelayanan publik yang prima, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Penerapan e-government belum sepenuhnya terlaksana;
2. kebijakan, tata kelola dan pelayanan yang belum optimal;
3. Belum optimalnya inovasi yang dikembangkan dalam pelayanan publik;
4. Peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik masih belum efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja, serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan baik sarana teknologi maupun informasi;
6. PPID Pembantu belum optimal melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan menyampaikan dokumen/informasi;
7. Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
8. Belum optimalnya penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat;

9. Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik;
10. Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan;
11. Belum tuntasnya pembangunan jalan parallel perbatasan dan akses parallel perbatasan;
12. Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar, serta belum terealisasinya pembangunan fly over di Kota Pontianak;
13. Belum semua kawasan strategis/kawasan industry/kawasan ekonomi khusus maupun pusat kegiatan nasional yang dapat didukung dengan akses jalan;
14. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
15. Belum meratanya kualitas layanan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Kesehatan;
16. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
17. Sarana dan prasarana penunjang kesehatan belum optimal;
18. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan;
19. Angka melek aksara di Kalimantan Barat masih relatif kecil;
20. Belum operasionalnya angkutan/trayek antar Negara (orang dan barang) di Badau dan Aruk;
21. Belum operasionalnya terminal barang export-import di Entikong;
22. Kapasitas bandara Rahadi Oesman-Ketapang sudah melebihi kapasitas tampungnya (overload), sehingga perlu segera dikembangkan;
23. Pengembangan Bandara Paloh belum optimal padahal bandara ini telah masuk kedalam tataran kebandaraan nasional;
24. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Kuantitas dan kompetensi (attitude) pegawai belum optimal dalam mendukung organisasi berkinerja tinggi;
- 2) Peningkatan kompetensi ASN berdasarkan standar kompetensi dan persyaratan jabatan belum sepenuhnya diterapkan;
- 3) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 4) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai masih rendah.

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) Masih terdapat ASN yang terlambat dan tidak menyampaikan LHKPN.

c. Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1) Pelayanan Administratif

- (1) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi;
- (2) Penerapan teknologi informasi di pemerintahan masih bersifat parsial, belum terdapat integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien;
- (3) Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
- (4) Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal.

2) Pelayanan Barang

- (1) Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik;
- (2) Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan.

3) Pelayanan Jasa

- (1) Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas relatif masih rendah;
- (2) Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dasar di wilayah-wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi;
- (4) Akses infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi;

- (5) Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
- (6) Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
- (7) Belum semua kawasan strategis/kawasan industri/kawasan ekonomi khusus maupun pusat kegiatan nasional yang dapat didukung dengan akses jalan;
- (8) Belum tuntasnya pembangunan jalan parallel perbatasan dan akses parallel perbatasan;
- (9) Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar, serta belum terealisasinya pembangunan fly over di Kota Pontianak;
- (10) Belum operasionalnya angkutan/trayek antar Negara (orang dan barang) di Badau dan Aruk;
- (11) Belum dibangunnya terminal barang export-import di Aruk, Badau, Jagoi Babang;
- (12) Belum operasionalnya terminal barang export-import di Entikong;
- (13) Kapasitas bandara Rahadi Oesman-Ketapang sudah melebihi kapasitas tampungnya (overload), sehingga perlu segera dikembangkan;
- (14) Pengembangan Bandara Paloh belum optimal padahal bandara ini telah masuk kedalam tataran kebandaraan nasional;
- (15) Lemahnya proses pembangunan rel kereta api, sedangkan FS dan DED nya sudah tersedia;
- (16) Kualitas dan kuantitas sarana sosial di Kalimantan Barat belum maksimal;
- (17) Angka melek aksara di Kalimantan Barat masih relatif kecil;
- (18) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknologi informasi komunikasi.

4) Pelayanan Regulatif

- (1) Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga

masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara;

- (2) Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi salah satunya dengan adanya Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta disaksikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 2) Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of change;

- 3) Tidak hanya jabatan Pimpinan Tinggi, namun jabatan Administrator, dan Pengawas diwajibkan menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 4) Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan;
- 5) Inspektorat telah dilakukan penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP;
- 6) Kebutuhan jumlah APIP yang mulai memadai dengan pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian;
- 7) SPIP sudah mulai diterapkan;
- 8) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanann dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD;
- 9) Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar;
- 10) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3;
- 11) Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi;
- 12) Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan publik;
- 13) Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 2,55 yang telah dinilai secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun utk hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB belum ditetapkan;
- 14) Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan publik;
- 15) Tersedianya peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik;
- 16) Terselenggaranya pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik;

- 17) PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah telah ditetapkan untuk menjamin keterbukaan publik;
- 18) Prosentase rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pertahunnya;
- 19) Urusan penataan ruang mengalami peningkatan sebesar 29,24 persen pada tahun 2017, dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 28,73%;
- 20) Pelayanan ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 5,34% dibanding tahun sebelumnya;
- 21) Pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi;
- 22) Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 23) Telah dilakukan penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah;
- 24) Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi;
- 25) Fasilitas perhubungan sudah mulai dibangun;
- 26) Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar memperoleh predikat B. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang dapat mengukur kinerja perangkat daerah. Alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id;
- 27) Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP;
- 28) Kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat, dimana pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%;
- 29) Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat;
- 30) Menyusun Sistem pengembangan kompetensi ASN dan melakukan penilaian kinerja ASN setahun sekali dan

- Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2018 memperoleh kategori sedang;
- 31) Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik ASN;
 - 32) Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi;
 - 33) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Beranjak dari hal tersebut, maka dalam sektor ini, ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

- a. Peningkatan kualitas guru sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- b. Peningkatan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu;
- c. Penyediaan kualitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, buku, taman bacaan, sarana dan prasarana olah raga;
- d. Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online

4) Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan

kesehatan sangat diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Dalam sektor pelayanan kesehatan, yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. Peningkatan Layanan Kesehatan Perempuan (deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara);
- d. Deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya selama 5 (lima) tahun kedepan dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK.

2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan..

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diambil Inspektorat Provinsi.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, juga menjadi unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Provinsi harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

5. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

B. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sasaran Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya	Prosentase perangkat	20%	40%	60%	80%	100%

pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur					
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial, dan sertifikasi kompetensi teknis	75%	85%	95%	100%	100%
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara	88%	90%	95%	100%	100%
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur setda Prov. Kalbar	Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	16%	32%	48%	64%	80%

b. Peningkatan Pengawasan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sasaran Peningkatan Pengawasan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	9,85%	19,7%	29,55%	39,4%	49,25%
Penerapan SPIP secara optimal	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3,52%	7,05%	10,58%	14,11%	17,64%

	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tingkat partisipasi aktif inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi	100%	100%	100%	100%	100%

c. Peningkatan Pelayanan Publik

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan publik terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sasaran Pelayanan Publik

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat	83 (baik)	85 (baik)	87 ((baik)	89 (baik)	91 (sangat baik)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)	87%	87%	88%	88%	89%
	Prevalensi penderita penyakit menular	152	172	192	212	232
	Persentase Posyandu Aktif	32%	35%	37%	39%	40%
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan	60%	65%	70%	75%	80%

	kesehatan dasar pencegahan dan pengobatan penyakit (PAK, PAHK)					
Meningkatnya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi.	Persentase kepemilikan KTP-el	0,84	1	1	1	1
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0,18	0,5	0,6	0,75	0,8
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	56%	56,05%	56,1%	56,15%	56,2%
	Persentase kelulusan SMA/SMK	95,71%	95,73%	95,75%	95,75%	95,82%
	Angka partisipasi kasar PAUD, SD/MI/Paket A, dan Perguruan Tinggi	61,05%	61,07%	61,08%	61,09%	61,11%
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/Paket C	81,92%	81,94%	81,96%	81,98%	82%
Meningkatnya akses infrastruktur dasar di wilayah-	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan optimal	8,69896 3	9,5737 705	10,350 354	11,077 8255	11,8160 4025

wilayah terpencil belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi						
	Panjang jalan yang dibangun	10	32	28	12	12
	Jumlah jembatan kewenangan Provinsi yang ditangani	110	300	300	300	300
Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip Dengan Kategori Cukup	13,33%	20%	26,67%	40%	53,33%
Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin cepat, mudah, dan aksesibilitas tinggi.	Mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan	B	B	A	A	A

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

1) Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 4. Sasaran Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penguatan komitmen pimpinan dari level tertinggi hingga terendah di dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam melaksanakan	Terlaksananya seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Provinsi	3,52%	7,05%	10,58 %	14,11 %	17,64 %

seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi					
---	--	--	--	--	--	--

2) Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of change

Tabel 5. Sasaran Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of change

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi	Prosentase meningkatnya integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi dan penguasaan agent of change	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan

3) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Tabel 6. Sasaran Penyusunan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kesadaran ASN dalam menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

4) Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan

Tabel 7. Sasaran Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif	Prosentase sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan	80%	95%	100%	100%	100%

5) Inspektorat telah dilakukan penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP

Tabel 8. Sasaran pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Prosentase peningkatan kapabilitas APIP	9,85%	19,70%	29,55 %	39,40 %	49,25 %

6) Kebutuhan jumlah APIP yang mulai memadai dengan pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

Tabel 9. Sasaran Peningkatan APIP

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kuantitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Prosentase peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal (APIP)	100%	100%	100%	100%	100%

7) SPIP sudah mulai diterapkan

Tabel 10. Sasaran Penerapan SPIP

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan)	Prosentase peningkatan maturitas SPIP	3,80%	7,60%	11,40 %	15,20 %	19,00 %

8) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanaan dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD

Tabel 11. Sasaran Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya partisipasi publik pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase peningkatan partisipasi publik pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%

9) Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar

Tabel 12. Sasaran Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya transparansi informasi dan kepercayaan publik mengenai perencanaan dan pelaksanaan APBD	Prosentase peningkatan fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%

10) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3

Tabel 13. Sasaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan menggunakan e-procurement dan e-catalog

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%

11) Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi

Tabel 14. Sasaran Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi	Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	0,3%	0,5%	0,6%	0,75%	0,9%

12) Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan public

Tabel 15. Sasaran Penyelenggaraan urusan pemerintah berbasis aplikasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis e-government	IKM Provinsi Kalimantan Barat	83 (baik)	85 (baik)	87 (baik)	89 (baik)	91 (sangat baik)

13) Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 2,55 yang telah dinilai secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun utk hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB belum ditetapkan

Tabel 16. Sasaran Peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta	Meningkatnya indeks SPBE	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya						
--	--	--	--	--	--	--

14) Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan publik

Tabel 17. Sasaran Penerapan Inovasi dalam pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan aksesibilitas tinggi.	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	85 (baik)	87 (baik)	89 (sangat baik)	91 (sangat baik)	93 (sangat baik)

15) Tersedianya peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik

Tabel 18. Sasaran Penyusunan Peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah	Jumlah kebijakan penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur	3 kebijakan	4 kebijakan	5 kebijakan	6 kebijakan	7 kebijakan

16) Terselenggaranya pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik

Tabel 19. Sasaran Pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas PNS di bidang pelayanan publik	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	20%	40%	60%	80%	100%

17) PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah telah ditetapkan untuk menjamin keterbukaan publik

Tabel 20. Sasaran Penetapan PPID Utama dan PPID Pembantu

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya layanan informasi untuk masyarakat yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan	Prosentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi Pembantu) seluruh OPD dengan kategori Informatif/Zona Hijau/Nilai 80-100	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%
	Jumlah Lembaga media local yang dibina	5 media lokal	5 media lokal	5 media lokal	5 media lokal	10 media lokal

18) Prosentase rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pertahunnya

Tabel 21. Sasaran Peningkatan rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya rumah layak huni yang sesuai standar kesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan	Jumlah ketersediaan permukiman yang terfasilitasi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	1	1	1	1	1

19) Urusan penataan ruang mengalami peningkatan sebesar 29,24 persen pada tahun 2017, dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 28,73 persen

Tabel 22. Sasaran Peningkatan Urusan penataan ruang

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Panjang jalan kewenangan provinsi dalam kondisi mantap	8.698 963	9.5737 705	10.35 0354	11.077 8255	11.816 04025
	Panjang jalan yang dibangun	10	32	28	12	12

20) Pelayanan ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 5,34% dibanding tahun sebelumnya

Tabel 23. Sasaran Peningkatan Pelayanan ketenagalistrikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pemerataan akses listrik bagi masyarakat	Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan dibidang ketenaga listrikan	32%	41,2%	50,5%	59,8%	69,1%
	Persentase Desa berlistrik	81	83	85	87	89

21) Pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi

Tabel 24. Sasaran Peningkatan jalan dan jembatan status provinsi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pemanfaatan aset-aset prasarana jalan dan jembatan yang dimiliki secara optimal dalam rangka mengurangi biaya transportasi dan peningkatan efisiensi kekuatan ekonomi masyarakat	Jumlah jembatan kewenangan provinsi yang ditangani	110	300	300	300	300
	Prosentase peningkatan kondisi jalan mantap	0,069 7%	0,057%	0,050 6%	0,0474 %	0,0481 %

22) Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 25. Sasaran Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif bagi masyarakat	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	77%	80%	82%	85%	88%

23) Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi

Tabel 26. Sasaran Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi siswa sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai terutama yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,20 %	67,87%	68,69 %	69,68 %	70,78 %
	Rata-rata Lama Sekolah	7,78	8,2	8,9	9,5	10,4
	Harapan Lama Sekolah	12,9	13,2	13,7	14,2	14,5

24) Fasilitas perhubungan sudah mulai dibangun

Tabel 27. Sasaran Peningkatan fasilitas perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan	Persentase Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	0,48%	0,5%	0,55%	0,6%	0,65%
	Ketersediaan terminal Tipe B	0,3%	0,315%	0,3308%	0,3473%	0,3647%
	Persentase ketersediaan	9%	10%	11%	12%	13%

	fasilitasi perlengkapan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP)					
--	--	--	--	--	--	--

25) Telah dilakukan penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah

Tabel 28. Sasaran penataan kelembagaan/organisasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya struktur dan model kelembagaan pemerintahan daerah yang proporsional dan tepat sesuai kebutuhan (flat, transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi, efisien dan efektif)	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata	15 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah

26) Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar memperoleh predikat B. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang dapat mengukur kinerja perangkat daerah. Alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id

Tabel 29. Sasaran Peningkatan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan meraih predikat A	Komponen SAKIP Nilai pelaporan kinerja	10,5	11	11,5	12	12,5

27) Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP

Tabel 30. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

28) Kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat, dimana pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%

Tabel 31. Sasaran Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pertumbuhan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	67,00 %	74,00%	81,00 %	88,00 %	95,00 %

29) Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat

Tabel 32. Sasaran Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah yang memiliki konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran	Jumlah SKPD	114 SKPD	113 SKPD	113 SKPD	113 SKPD	113 SKPD
	Jumlah Buku/Do kumen	80 buku	80 buku	80 buku	80 buku	80 buku

30) Menyusun Sistem pengembangan kompetensi ASN dan melakukan penilaian kinerja ASN setahun sekali dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2018 memperoleh kategori sedang

Tabel 33. Sasaran Penyusunan Sistem pengembangan kompetensi ASN dan penilaian kinerja ASN

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tercapainya pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier guna meningkatkan profesionalisme birokrasi serta kualitas pelayanan publik dan manajemen SDM aparatur	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	24,95 %	14,73 %	14,73 %	15,57 %	15,80 %

31) Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik ASN

Tabel 34. Sasaran Penetapan dan Penerapan Kode Etik ASN

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya perilaku disiplin dan profesional ASN dan budaya instansi yang berkualitas sesuai kode etik dan kode perilaku	Persentase pembinaan aparatur sipil negara	100%	100%	100%	100%	100%

32) Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi

Tabel 35. Sasaran Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya ASN sebagai agen perubahan yang memiliki kompetensi dalam melakukan revolusi cara pandang,	Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	3,52 %	7,05%	10,58 %	14,11 %	17,64%

cara pikir dan cara kerja dalam memberikan pelayanan yang berkualitas						
	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	75%	85%	95%	100%	100%

33) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah

Tabel 36. Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pengelolaan arsip aktif yang baik, efisien dan efektif sesuai prosedur yang berlaku, dimulai dari tata cara pengurusan surat dan penggunaan prasarana dan sarana, tata cara pemberkasan arsip aktif, tata cara pembuatan daftar arsip, tata cara layanan penggunaan arsip aktif, pengamanan dan penyelamatan arsip aktif, dan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku di ANRI	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	13,33 %	20,00 %	26,67 %	40,00 %	53,33 %
	Persentase Lembaga Kearsipan Darah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	29%	43%	57%	71%	86%
	Jumlah arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	28.376 item	28.576 item	28.776 item	28.978 item	29.176 item

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Tabel 37. Sasaran Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas guru	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	56%	56,05 %	56,1%	56,15 %	56,2%
	Persentase Guru produktif yang bersertifikasi kompetensi	32,7%	32,9%	33,1%	33,3%	33,5%
	Persentase Guru bersertifikasi pendidik	66,8%	66,9%	67%	67,1%	67,2%

b. Penyediaan kualitas penunjang pendidikan (laboratorium, buku)

Tabel 38. Sasaran Penyediaan kualitas penunjang pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya fasilitas penunjang pendidikan	Jumlah koleksi buku perpustakaan	500 judul	500 judul	500 judul	500 judul	500 judul
	Jumlah kegiatan pengembangan minat baca	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali
	Jumlah koleksi daerah yang dilestarikan	300 judul	300 judul	300 judul	300 judul	300 judul

c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Tabel 39. Sasaran Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya fasilitas penunjang pendidikan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	45%	55%	65%	75%	100%
	Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter	80%	100%	100%	100%	100%

	spesialis penunjang					
	JumlahSDMKesehatanyang ditingkatkankompetensinya (orang)	230	250	270	300	320

d. Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Tabel 40. Sasaran Peningkatan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Gizi dan Kesehatan ibu dan anak	Persentaseibuhamilyangmendapat pelayanantenatal(K4)	87%	87%	88%	88%	89%
	Cakupan pertolongan(PF)persalinandifasilitas pelayanankesehatan	80%	81%	82%	83%	84%
	PersentasekunjunganpelayananNeonatalpertama(KN1)	88%	88,5%	89%	89,5%	90%
	Persentasekunjunganbalitasesuai standar	86%	87%	88%	89%	90%

e. Layanan Kesehatan Perempuan (Deteksi Dini Kanker Payudara, dan kanker serviks)

Tabel 41. Sasaran Peningkatan Layanan Kesehatan Perempuan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya layanan kesehatan perempuan untuk pencegahan dan pengendalian penyakitkanker payudara dan kanker serviks	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	10%	13%	16%	19%	22%

f. Deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular

Tabel 42. Sasaran Deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya layanan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Puskesmas yang melakukandeteksi dini dan rujukankasus Katarak	10%	20%	30%	40%	50%
	JumlahKab/Kotayang memiliki minimal20%Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatanjiwadanNAPZA (kab/kota)	5	7	9	11	14

g. Pelayanan Puskesmas diluar gedung

Tabel 43. Sasaran Pelayanan Puskesmas diluar gedung

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya layanan puskesmas	Persentase puskesmas yang menyelenggarakanke sehatan dasar	60%	65%	70%	75%	80%
	Persentase Posyandu Aktif	32%	35%	37%	39%	40%
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS	85%	90%	100%	100%	100%

h. Pelayanan Perizinan

Tabel 44. Sasaran Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan perizinan	Mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan	B	B	A	A	A
	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan	1000 izin dan non	1350 izin dan non	1350 izin dan non	1350 izin dan non	1350 izin dan non

		izin	izin	izin	izin	izin
--	--	------	------	------	------	------

1) Quick Wins

(a). Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK

Tabel 45. Sasaran Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi siswa sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai terutama yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,20 %	67,87 %	68,69 %	69,68 %	70,78 %

(b). Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Tabel 46. Sasaran Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan	Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar	42%	52%	63%	73%	88%

4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 47. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	83 (baik)	85 (baik)	87 (baik)	89 (baik)	90 (sangat baik)

5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-Kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. Penyusunan analisis jabatan;
2. Penyusunan analisis beban kerja;
3. Penyusunan Evaluasi Jabatan;
4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
5. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat;
6. Asesment individu berdasarkan kinerja;

7. Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
8. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
9. Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
10. Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
11. Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
12. Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
13. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
14. Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
15. Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
16. Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
17. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
18. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
19. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;

- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, meraih dan pertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD;
- 7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan;
- 8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD;
- 9) Sosialisasi LHKPN
- 10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
- 11) Penerapan *wistle blower*
- 12) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 13) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 14) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana);
- 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan;
- 3) Peningkatan akses layanan pendidikan;
- 4) Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia);

- 5) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia);
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- 8) Penerapan teknologi informasi;
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara;
- 10) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan khususnya daerah terpencil;
- 11) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;;
- 13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

1) Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- a. Melaksanakan konsolidasi antar instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi;
- b. Melaksanakan pengawasan melekat;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan korupsi;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of change

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Sosialisasi dan internalisasi anti korupsi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan agent of changemeliputi :

- e. Sosialisasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK);
- f. Monitoring dan evaluasi penerapan budaya anti korupsi dalam birokrasi;
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penyusunan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)meliputi :

- a. Sosialisasi penyusunan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- c. Monitoring pelaksanaan LHKPN;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

4) Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Harmonisasi produk hukum sudah dan terus dilaksanakanmeliputi :

- a. Harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Sinkronisasi Peraturan Per Undang-undangan.

- c. Monitoring pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5) Inspektorat telah dilakukan penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penataan dengan peraturan yang terbaru dan telah dilakukan Rakorwas dan pelatihan untuk peningkatan kualitas APIP di Lingkungan Inspektorat meliputi :

- a. Workshop Telaah Sejawat;
- b. Monitoring pelaksanaan Rakorwas dan pelatihan peningkatan kualitas APIP;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

6) Kebutuhan jumlah APIP yang mulai memadai dengan pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas jumlah APIP meliputi :

- a. Pelaksanaan inpassing pada jabatan Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian;
- b. Penerimaan CPNS untuk auditor;
- c. Monitoring pelaksanaan inpassing jabatan auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian, serta usulan kebutuhan auditor
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

7) SPIP sudah mulai diterapkan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan penerapan SPIP meliputi :

- a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPIP;
- b. Pengawasan Melekat;
- c. Monitoring pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

8) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanaan dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan seperti dalam perencanaan dengan melibatkan masyarakat pada Konsultasi publik RPJMD meliputi :

- a. Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders) yaitu melalui pelaksanaan Musrenbang;
- b. Monitoring pelaksanaan Musrenbang;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

9) Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengekspose APBD Pemprov. Kalbar meliputi :

- a. Ekspose perencanaan dan pelaksanaan APBD melalui website resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan APBD;

- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

10) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan telah menggunakan e-procurement dan e-catalog sehingga meminimalisir terjadinya KKN dan saat ini menuju UKPBJ Level 3 meliputi :

- a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan menggunakan e-procurement dan e-catalog;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

11) Tersedianya sarana pengaduan untuk penyampaian informasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi meliputi :

- a. Pengelolaan dan Peningkatan sarana pengaduan;
- b. Monitoring pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan sarana pengaduan;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

12) Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah sebagian besar menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan publik meliputi :

- a. Peningkatan aplikasi e-government;
- b. Diklat peningkatan SDM di bidang teknologi informasi
- c. Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi mengenai pelaksanaan e-government;
- d. Sosialisasi di internal Pemerintah Provinsi Kalbar maupun di masyarakat mengenai e-government;
- e. Monitoring penerapan pelayanan publik berbasis e-government;
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

13) Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 2,55 yang telah dinilai secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun utk hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB belum ditetapkan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- a. Asistensi SPBE khususnya pada domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE, dan penerapan layanan SPBE;
- b. Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Monitoring dan Evaluasi SPBE;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

14) Terdapat beberapa inovasi dalam pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik meliputi :

- a. Penyusunan inovasi pelayanan publik;
- b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP);
- c. Monitoring pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

15) Tersedianya peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan penerapan peta proses bisnis dan SOP pelayanan publik meliputi :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan Peta Proses Bisnis dan SOP;
- b. Monitoring dan evaluasi penerapan peta proses bisnis dan SOP.
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

16) Terselenggaranya pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan pelatihan bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan publik meliputi :

- a. Diklat/Workshop bagi PNS di bidang pelayanan publik;
- b. Monitoring kinerja PNS di bidang pelayanan publik;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

17) PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah telah ditetapkan untuk menjamin keterbukaan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka PPID meningkatkan kualitas layanan PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah meliputi :

- a. Komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi;
- b. Pengelolaan data base informasi;
- c. Monitoring pengelolaan data base informasi dalam memberikan pelayanan informasi publik;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

18) Prosentase rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pertahunnya

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan rumah layak huni dan perumahan sehat di Kalimantan Barat meliputi :

- a. Perencanaan penataan kawasan permukiman
- b. Penataan kawasan permukiman
- c. Monitoring dan evaluasi penataan Kawasan permukiman
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

19) Urusan penataan ruang mengalami peningkatan sebesar 29,24 persen pada tahun 2017, dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 28,73 persen

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan penataan ruang meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);

- c. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi
- e. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota;
- f. Monitoring pelaksanaan penataan ruang;
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

20) Pelayanan ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 5,34% dibanding tahun sebelumnya

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan sebelumnya meliputi :

- a. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. Monitoring pemerataan pelayanan dan pengembangan akses listrik bagi masyarakat;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

21) Pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi;
- b. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan status provinsi;
- c. Pemeliharaan jalan dan jembatan status provinsi;
- d. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

- e. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

22) Peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar;
- b. Pemeliharaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit di lingkungan Pemprov. Kalbar;
- c. Monitoring pelaksanaan peningkatan fasilitas kesehatan lanjutan pada rumah sakit;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

23) Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi meliputi :

- a. Penyusunan data siswa berprestasi;
- b. Pemberian beasiswa pada siswa berprestasi terutama bagi yang kurang mampu dalam biaya Pendidikan;
- c. Monitoring pelaksanaan pemberian beasiswa pada siswa berprestasi;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

24) Fasilitas perhubungan sudah mulai dibangun

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan fasilitas perhubungan meliputi :

- a. Peningkatan fasilitas perhubungan
- b. Pengelolaan fasilitas perhubungan
- c. Monitoring pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan fasilitas perhubungan
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

25) Telah dilakukan penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan/organisasi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah meliputi :

- a. Penataan Kelembagaan
- b. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

26) Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar memperoleh predikat B. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang dapat mengukur kinerja perangkat daerah. Alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu ekinerja.kalbarprov.go.id

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov. Kalbar meliputi :

- a. Penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja;
- f. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

27) Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Opini BPK terhadap LKPD Pemprov Kalbar WDP meliputi :

- a. Penyusunan laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Sosialisasi tertib administrasi keuangan;
- c. Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- d. Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
- e. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

28) Kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat, dimana pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penertiban aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- a. Penataan aset daerah;
- b. Meningkatkan kompetensi pengelola/pengurus barang milik daerah;
- c. Monitoring dan evaluasi penataan aset daerah;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

29) Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Asistensi dan verifikasi program dan kegiatan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. Asistensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap SKPD;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RKA
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

30) Menyusun Sistem pengembangan kompetensi ASN dan melakukan penilaian kinerja ASN setahun sekali dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2018 memperoleh kategori sedang

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan sistem pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan Indeks Profesionalisme ASN meliputi :

- a. Penyusunan Anjab;
- b. Penyusunan ABK;
- c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- d. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat;
- e. Asesment individu berdasarkan kinerja;
- f. Penyempurnaan job grading;
- g. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu ;
- h. Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor);
- i. Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor);
- j. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- k. Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai;
- l. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai;

- m. Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- n. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana ;
- o. Penyusunan Evaluasi Jabatan ;
- p. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS;
- q. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- s. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

31) Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik ASN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan Kode Etik ASN meliputi :

- a. Penilaian kinerja dan disiplin ASN;
- b. Penerapan Reward dan punishment;
- c. Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

32) Diklat revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan revolusi mental dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi meliputi :

- a. Diklat revolusi mental;
- b. Monitoring dan evaluasi revolusi mental ASN;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

33)Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kearsipan di setiap perangkat daerah meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan kearsipan;
- b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi kearsipan;
- c. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Penyediaan kualitas penunjang pendidikan (laboratorium, buku, taman bacaan, sarana dan prasarana olahraga)

- 1) Menyusun rencana peningkatan kualitas penunjang pendidikan (laboratorium, buku, taman bacaan, sarana

dan prasarana olahraga);

- 2) Penyediaan dan peningkatan laboratorium, perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, serta sarana dan prasarana olahraga;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online

- 1) Menyusun rencana pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- 2) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;

- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

- 1) Menyusun rencana peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Peningkatan pelayanan antenatal (K4)
- 3) Peningkatan layanan pertolongan (PF) persalinan
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

f. Deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular

- 1) Menyusun rencana kegiatan deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular;
- 2) Pelaksanaan kegiatan deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini resiko penyakit menular dan tidak menular;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

1) Quick Wins

(a). Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK

- (1). Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin;
- (2). Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi

syarat menerima beasiswa;

- (3). Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK;
- (4). Melakukan monitoring pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin;
- (5). Melakukan evaluasi pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin;
- (6). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

(b). Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

- (1) Menyusun rencana peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- (2) Menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk sarana dan prasarana kesehatan;
- (3) Melaksanakan kegiatan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- (4) Monitoring pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- (5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- (6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

- (c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- (d). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- (e). Monitoring
- (f). Evaluasi
- (g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1 Peningkatan SDM Aparatur	1) Penyusunan analisis jabatan
	2) Penyusunan analisis beban kerja
	3) Penyusunan Evaluasi Jabatan
	4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
	5) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat
	6) Asessment individu berdasarkan kinerja
	7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
	8) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis
	9) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai
	10) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional
	11) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai
	12) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai
	13) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai
	14) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya
	15) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai
	16) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model
	17) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana

	Program	Kegiatan
		18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana 19) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
2	Penguatan Pengawasan	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor 2) Penyusunan rencana pengembangan auditor 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 4) Penerapan SPIP 5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM) 6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD 7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan 8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD 9) Sosialisasi LHKPN 10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat 11) Penerapan <i>wistle blower</i> 12) Monitoring 13) Evaluasi 14) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 15) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan
3	Peningkatan Pelayanan Publik	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana) 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan 4) Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia) 5) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia) 6) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 7) Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi 8) Penerapan teknologi informasi

Program		Kegiatan
		9) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara
		10) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan khususnya daerah terpencil
		11) Monitoring
		12) Evaluasi
		13) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
4	Penguatan Akuntabilitas	1) Review rencana strategis pemerintah daerah
		2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya
		3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja
		4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja
		5) Pelaksanaan manajemen kinerja
		6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
		7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja
		8) Monitoring
		9) Evaluasi
		10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
		12) Review rencana strategis pemerintah daerah
		13) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya
5	Quick Wins	
a.	1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK	(1) Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin
		(2) Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa
		(3) Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK
		(4) Melakukan monitoring pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin
		(5) Melakukan evaluasi pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk

Program		Kegiatan
		siswa miskin
		(6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
b.	2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	(1) Menyusun rencana peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		(2) Menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk sarana dan prasarana kesehatan
		(3) Melaksanakan kegiatan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		(4) Monitoring pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		(5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		(6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
c.	Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	(1) Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;
		(2) Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih
		(3) Uji coba
		(4) Penyempurnaan hasil uji coba
		(5) Sosialisasi
		(6) Penerapan
		(7) Monitoring
		(8) Evaluasi
		(9) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		(10) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik.
d.	Zona Integritas	(1) Penyiapan Inspektorat Provinsi Kalbar sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		(2) Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		(3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		(4) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		(5) Monitoring
		(6) Evaluasi
		(7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

	Program	Kegiatan
		untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
7	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
8	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2023
9	Penataan Tatalaksana	
10	Penguatan dan Penataan Organisasi	

4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

B. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran Road Map Reformasi Birokrasi ini.

LAMPIRAN ROAD MAP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Anjab b. Pelaksanaan Anjab c. Penyusunan Hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019												Biro Organisasi BKD	Rp. 120.166.300,00
				2019													
				2019													
	2) Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan ABK b. Pelaksanaan ABK c. Penyusunan Hasil d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019												Biro Organisasi BKD	Rp. 76.834.300,00
				2019													
				2019													
	3) Penyusunan dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan c. Penyusunan hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019												Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 52.178.300,00
				2019													
				2019													

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Penyusunan Kebutuhan DiKlat Analisis	Dokumen rencana kebutuhan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai c. Penerapan hasil pada rekrutmen d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
5)	Assesment individu berdasarkan kinerja	Laporan kinerja individu 1 dokumen	a. Penyusunan rencana Assessment individu berdasarkan kinerja b. Pelaksanaan Assessment individu berdasarkan kinerja c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi															BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
6)	Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	%pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															BKD BPSDM Biro Organisasi	Rp. 150.000.000,00.
7)	Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru	Dokumen rencana pengembangan pegawai	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan															Biro Organisasi BKD	Rp. 100.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	dan auditor)	1 dokumen	pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai														BPSDM	
8)	Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)	Dokumen rencana penempatan dan pola karier	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai b. Penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai c. Penerapan rencana penempatan dan pola karier d. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 170.000.000,00.
9)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai	1 dokumen															BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.
10)	Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	g. Tindak lanjut hasil evaluasi a. Penyusunan rencana sistem kinerja pegawai b. Manajemen Sistem kinerja pegawai c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba														BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.
11)	Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				2019														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	d. Tindaklanjuti hasil evaluasi a. Penyusunan rencana sosialisasi b. Pelaksanaan sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.
13)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring														BKD	Rp. 100.000.000,00.
14)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														BKD	Rp. 80.000.000,00.
15)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan program SDM														BKD	Rp. 70.000.000,00.
16)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Beryani	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														BKD BPSDM	Rp. 80.000.000,00.
2.	Penguatan Pengawasan																	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1)	Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 4 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur												Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.	
2)	Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 8 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur												Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.	
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Penyusunan rencana penerapan SPIP														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
		70%	b. Sosialisasi															
4)	Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penerapan SPIP di SKPD														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindaklanjut hasil evaluasi															
5)	Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 9 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur												Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 130.000.000,00.	
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana														Biro Organisasi Inspektorat	Rp. 150.000.000,00.
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi administrasi tertib														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 160.000.000,00.
8)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK WTP	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 120.000.000,00.
			b. Tindak lanjut hasil monitoring														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN 80%	Sosialisasi LHKPN														BKD Inspektorat	Rp. 150.000.000,00.
10)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN 80%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN														BKD Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
11)	Penerapan wistle blower	80% % jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 70% (jika ada yang pengaduan masuk)	a. Tindak lanjut hasil monitoring a. Penyusunan rencana penerapan wistle blower b. Penyusunan pedoman pelaksanaan wistle blower c. Sosialisasi d. Penerapan wistle blower e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 270.000.000,00.
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan program penguatan pengawasan														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 80.000.000,00.
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud dengan perkembangan	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, target-target dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	kemajuan reformasi birokrasi dalam program Pengawasan dan Penguatan Pemerintahan Kabupaten Beryani		<p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/pencantuman kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>															
3.	<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan</p> <p>1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, penzinan, kesehatan, sarana dan prasarana)</p> <p>2) Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan</p> <p>3) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu</p>	<p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>70%</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>70%</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan Kalimantan Barat</p> <p>70%</p>	<p>a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan</p> <p>b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya</p> <p>c. Pelaksanaan survey</p> <p>d. Pengolahan data dan analisis hasil survey</p> <p>e. Penyusunan rekomendasi</p> <p>Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan</p> <p>a. Penyusunan rencana peningkatan pemerataan akses pelayanan Pendidikan</p> <p>b. Pelaksanaan program pemberian beasiswa siswa miskin SMA/SMK (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p>															<p>Rp. 130.000.000,00.</p> <p>Rp. 100.000.000,00.</p> <p>Rp. 80.000.000,00.</p> <p>Rp. 300.000.000,00.</p> <p>Rp. 100.000.000,00.</p>

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			d. Evaluasi														Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut evaluasi														
4)	Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi guru b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi														Rp. 70.000.000,00.
5)	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi tenaga kesehatan b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi														Rp. 150.000.000,00.
6)			c. Tindaklanjut evaluasi														Rp. 70.000.000,00.
			d. Evaluasi														Rp. 100.000.000,00.
			a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi tenaga kesehatan b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi														Rp. 100.000.000,00.
																	Rp. 70.000.000,00.
																	Rp. 200.000.000,00.
																	Rp. 100.000.000,00.

7) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins) b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	Dinkes Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 3.500.000.000,00.
8) Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana teknologi informasi pada sistem pelayanan b. Identifikasi user requirement c. Uji coba sistem d. Penerapan teknologi informasi e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi																	Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
9) Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2 b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	DPMPTSP Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 170.000.000,00.

2019

2019

10) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p>	<p>Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 7.000.000.000,00.
11) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dasar ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan bertahap peningkatan infrastruktur dasar ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peningkatan infrastruktur dasar</p>	<p>Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 500.000.000.000,00.
12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Melaksanakan monitoring perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik</p> <p>b. Evaluasi seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>		Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 150.000.000,00.
13) Melakukan perbaikan yang diperlukan seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi		Perbaikan kegiatan-kegiatan program peningkatan kualitas pelayanan publik			Rp. 120.000.000,00.

<p>perbaikan berkelanjutan</p> <p>14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>% hasil mntoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%</p>	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD</p>	<p>Rp. 120.000.000,00.</p>
<p>4. Penguatan Akuntabilitas</p> <p>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya</p> <p>b. Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 90.000.000,00.</p> <p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p> <p>b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 110.000.000,00.</p>
<p>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 100.000.000,00.</p>
<p>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas</p>	<p>a. Pelaksanaan manajemen</p>	<p>Bappeda</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>

	kinerja	kinerja	kinerja			Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 80.000.000,00.
6)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 170.000.000,00.	
7)	Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja b. Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja c. Monitoring Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja b. Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja c. Monitoring Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00.	Rp. 80.000.000,00. Rp. 60.000.000,00.
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 150.000.000,00.	
9)	Evaluasi terhadap seluruh	% kegiatan yang	Evaluasi terhadap seluruh		Biro	Rp. 150.000.000,00.	

Kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	dilaksanakan sesuai target	Kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 60.000.000,00.
10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penguatan Akuntabilitas	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	
11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparaturdi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	% hasil monitoring dan evaluasi yang diundaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/ penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 100.000.000,00.
5. Quick Wins				
1) Pilot Project Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK	80%			
(1). Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin		a. Penyusunan rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin b. Rapat koordinasi dengan instansi terkait	Biro Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Humas Diskominfo	Rp. 600.000.000,00.
(2). Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		a. Sosialisasi Program Beasiswa b. Pelaksanaan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		
c. Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK		a. Pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK		

6.	Zona WBK/WBBM	Integritas Menuju	<p>(1). Penyiapan Inspektorat Provinsi sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</p> <p>(2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</p> <p>(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(4). Monitoring</p> <p>(5). Evaluasi</p> <p>(6). Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.</p> <p>(7). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya</p>	<p>Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>2</p> <p>Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>2</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah provinsi Kalbar</p> <p>70%</p> <p>% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target</p> <p>90%</p> <p>% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target</p> <p>90%</p> <p>% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target</p> <p>90%</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda</p> <p>70%</p>	<p>Penyiapan Provinsi sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>a. Monitoring</p> <p>b. Tindak lanjut monitoring</p> <p>Evaluasi</p> <p>a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi</p> <p>b. Perbaikan terhadap sistem pelaksanaan berikutnya</p> <p>Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya</p> <p>Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>Rp.100.000.000,00</p> <p>Rp.150.000.000,00</p> <p>Rp.150.000.000,00</p> <p>Rp.100.000.000,00</p> <p>Rp.100.000.000,00</p> <p>Rp.130.000.000,00</p>	<p>Biro Organisasi Inspektorat</p> <p>Inspektorat</p> <p>Biro Organisasi</p>		
								7.	Penataan Tatakelola

1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Persentase tumpang tindih dan fungsi yang diselesaikan 80%	kasus tugas yang	a. Penyusunan rencana pemetaan proses bisnis pemerintahan	Biro Organisasi	Rp. 120.000.000,00
			b. Pelaksanaan pemetaan		
			c. Penyusunan hasil pemetaan		
2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase tumpang tindih dan fungsi yang diselesaikan	kasus tugas yang	a. Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD (proses bisnis) atas dasar hasil pemetaan dan penataan organisasi (disinergikan dengan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi)	Biro Organisasi	Rp. 120.000.000,00
			b. Penerapan mekanisme kerja		
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring		
3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	SOP yang	a. Penyusunan rencana perbaikan SOP di masing-masing SKPD	Biro Organisasi	Rp. 120.000.000,00
			b. Penyusunan SOP di SKPD		
			c. Penerapan SOP di SKPD		
4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Kalimantan Barat	Persentase tumpang tindih dan fungsi yang diselesaikan 80%	kasus tugas yang	a. Penyusunan pedoman diskresi	Biro Organisasi SKPD	Rp. 120.000.000,00
			b. Penerapan pedoman diskresi		
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring		
			d. Evaluasi hasil penerapan		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi		
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi		

		2019											
		2019											
5)	Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)	Prosentase pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 40%	c. Tindak lanjut hasil evaluasi Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)										Rp.150.000.000,00
6)	Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit dan e-procurement)	Prosentase pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 40%	<p>a. Identifikasi user requirement untuk semua jenis pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya</p> <p>b. Pelaksanaan dan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (fokus pada e-audit dan e-procurement)</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p>										Rp.300.000.000,00
7)	Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik 70%	<p>a. Penerapan keterbukaan informasi publik</p> <p>b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>c. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>										Rp.150.000.000,00
8)	Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan 70%	<p>a. Penyusunan rencana pedoman standarisasi fasilitas kantor</p> <p>b. Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor</p>										Rp.100.000.000,00

		2019													
		c. Sosialisasi													
		d. Penerapan pedoman													
		e. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring													
		f. Evaluasi hasil penerapan													
		g. Tindak lanjut hasil evaluasi													
9)	Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis													Rp. 100.000.000,00
		10													Rp. 70.000.000,00
10)	Kerjasama dengan pihak untuk pembukaan akses internet gratis	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis													Rp. 130.000.000,00
		10													
11)	Pembukaan akses internet gratis baru	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis													
		10													
12)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tataletak	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target													Rp. 100.000.000,00
		80%													

13)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana	Biro Organisasi Inspektorat	
14)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2019	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Tatalaksana	Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Humas	
15)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimakaud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	% hasil mitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya	Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Humas	
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung 3 (tiga) prioritas area perubahan yaitu peningkatan SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik	% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan publik 60%	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan publik b. Penyusunan rencana pembahasan penataan c. Perumusan kebijakan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP d. Penetapan kebijakan e. Implementasi	Biro Hukum Biro Organisasi	
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi 1) Penataan organisasi yang terkait	Jumlah organisasi yang	a. Identifikasi berbagai	Biro Organisasi	

LAMPIRAN ROAD MAP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Penyempurnaan Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan Anjab															Biro Organisasi BKD	Rp. 120.166.300,00		
			b. Pelaksanaan Penyempurnaan Anjab																		
			c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																		
			d. Penerapan hasil pada jabatan																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi																		
			2020																		
2)	Penyempurnaan Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan ABK															Biro Organisasi BKD	Rp. 76.834.300,00		
			b. Pelaksanaan Penyempurnaan ABK																		
			c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																		
			d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi																		
			2020																		
3)	Penyusunan dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan.	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan															Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 52.178.300,00		
			b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan																		
			c. Penyusunan hasil																		
			d. Penerapan hasil pada jabatan																		
			e. Monitoring dan tindak																		

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi																
				2020															
				2020															
4)	Penyusunan Kebutuhan Diklat Analisis	Dokumen rencana kebutuhan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan kebutuhan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai c. Penerapan hasil pada rekrutimen d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi																Rp. 100.000.000,00.
5)	Asesment individu berdasarkan kinerja	Laporan individu 1 dokumen	a. Penyusunan rencana asesment individu berdasarkan kinerja b. Pelaksanaan Asesment individu berdasarkan kinerja c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi																Rp. 100.000.000,00.
6)	Penerapan sistem rekrutimen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	%pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutimen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																Rp. 150.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Evaluasi f. Tindaklanjuti hasil evaluasi															
7)	Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)	Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai pengembangan pegawai														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
8)	Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)																	
9)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai	Dokumen rencana penempatan dan pola karier 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai b. Penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai c. Penerapan rencana penempatan dan pola karier d. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjuti hasil evaluasi														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 170.000.000,00.
10)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	a. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai b. Penyempurnaan Sistem Manajemen kinerja pegawai c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba														BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
11)	Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai														BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.		
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindaklanjuti hasil evaluasi																	
12)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi														BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.		
			b. Pelaksanaan sosialisasi																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																	
13)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														BKD	Rp. 100.000.000,00.		
			b. Tindak lanjut hasil monitoring																	
14)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														BKD	Rp. 80.000.000,00.		
15)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														BKD	Rp. 70.000.000,00.		
			b. Perbaikan kegiatan program SDM																	
16)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 80.000.000,00.		
			b. Penyusunan prioritas																	
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan																	
			d. Perbaikan/penyusunan																	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Pemerintah Kabupaten Beryani		kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
2.	Penguatan Pengawasan 1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 4 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 8 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP b. Sosialisasi														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
	4) Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
	5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 9 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 130.000.000,00.
	7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi administrasi tertib														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00. Rp. 160.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD														Biro Organisasi Inspektoral SKPD	Rp. 130.000.000,00.	
			b. Tindak lanjut hasil monitoring																
9)	Sosialisasi LHKPN	WTP	Sosialisasi LHKPN														Biro Organisasi Inspektoral SKPD	Rp. 160.000.000,00.	
			Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%																
10)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat														Biro Organisasi Inspektoral SKPD	Rp. 150.000.000,00.	
			b. Monitoring penyerahan LHKPN																
11)	Penerapan wistle blower	% jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Tindak lanjut hasil monitoring														Biro Organisasi Inspektoral Diskominfo SKPD	Rp. 270.000.000,00.	
			a. Penyusunan rencana penerapan wistle blower																
			b. Penyusunan pedoman pelaksanaan wistle blower																
			c. Sosialisasi																
			d. Penerapan wistle blower																
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			f. Evaluasi																
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Biro Organisasi Inspektoral SKPD	Rp. 100.000.000,00.	
			a. Tindak lanjut terhadap																
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi	% kegiatan yang	a. Tindak lanjut terhadap														Biro Organisasi	Rp.	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	dilaksanakan sesuai target 80%	hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan pengawasan														Inspektorat SKPD	80.000.000,00.
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Beryani	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi. b. Penetapan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/ penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, penzinan, kesehatan, sarana dan prasarana)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 130.000.000,00.
2)	Identifikasi kebutuhan manajemen perbaikan pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3)	Peningkatan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana aksesor peneraan pendidikan														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 80.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		70%	b. Pelaksanaan program pemberian beasiswa siswa miskin SMA/SMK (sebagaimana dihasikan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)															Rp. 300.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															Rp. 100.000.000,00.
			d. Evaluasi															Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi															
4)	Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi guru															Rp. 80.000.000,00.
		70%	b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru															Rp. 160.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															Rp. 70.000.000,00.
			d. Evaluasi															Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi															
5)	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi tenaga kesehatan															Rp. 70.000.000,00.
6)		70%	b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan															Rp. 200.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															Rp. 100.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7)	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Evaluasi															Dinkes Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 3.500.000.000,00.		
			a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)																		
			b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																		
			c. Evaluasi																		
8)	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Tindak lanjut hasil evaluasi															Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.		
			a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan																		
			b. Identifikasi requirement user																		
			c. Uji coba sistem																		
			d. Penerapan teknologi informasi																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
9)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2															DPMPTSP Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 170.000.000,00.		
			b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan																		
			c. Evaluasi																		
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																		

10) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p>	<p style="text-align: center;">Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 7.000.000.000,00.
11) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan bertahap peningkatan infrastruktur mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peningkatan infrastruktur dasar</p>	<p style="text-align: center;">Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 500.000.000.000,00.
12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Melaksanakan monitoring perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik</p> <p>b. Evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>		Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 160.000.000,00.
13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi		Perbaikan kegiatan-kegiatan program peningkatan kualitas pelayanan publik			Rp. 130.000.000,00.

	<p>perbaikan berkelanjutan</p> <p>14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%</p>	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penetapan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD</p>	<p>Rp. 120.000.000,00.</p>
4.	<p>Penguatan Akuntabilitas</p> <p>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya</p> <p>b. Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 90.000.000,00.</p>
	<p>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p> <p>b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 110.000.000,00.</p>
	<p>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyusunan rencana sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>
	<p>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 100.000.000,00.</p>
	<p>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas</p>	<p>a. Pelaksanaan manajemen</p>	<p>Bappeda</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>

	kinerja	kinerja	kinerja																Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 80.000.000,00.
6)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang kinerjanya sesuai target	70%	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 170.000.000,00.	
				c. Evaluasi hasil penerapan dan tindak lanjut hasil evaluasi																
				a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)																
				b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																
7)	Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai kinerja	B	c. Evaluasi hasil penerapan dan tindak lanjut hasil evaluasi														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00.	
				d. Tindak lanjut hasil evaluasi																
				a. Penyusunan rencana pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja																
				b. Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja																
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80%	c. Monitoring pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring														Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 150.000.000,00.	
				d. Evaluasi hasil penerapan dan tindak lanjut hasil evaluasi																
				a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas																
				b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas																
9)	Evaluasi terhadap seluruh	% kegiatan yang		Evaluasi terhadap seluruh													Biro	Rp. 150.000.000,00.		

Kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	dilaksanakan sesuai target	kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 60.000.000,00.
10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	
11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparaturdi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 100.000.000,00.
5. Quick Wins				
1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (lanjutan pelaksanaan quickwins)				
(1). Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin		a. Penyusunan rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin b. Rapat koordinasi dengan instansi terkait	Biro Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Humas Diskominfo	Rp. 600.000.000,00.
(2). Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		a. Sosialisasi Program Beasiswa b. Pelaksanaan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		
c. Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK		a. Pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin		

LAMPIRAN ROAD MAP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Penyempurnaan Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan Anjab															Biro Organisasi BKD	Rp. 125.000.000,00	
			b. Pelaksanaan Penyempurnaan Anjab																	
			c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																	
			d. Penerapan hasil pada jabatan																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
			2021																	
			2021																	
			2)	Penyempurnaan Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan ABK														
b. Pelaksanaan Penyempurnaan ABK																				
c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																				
d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai																				
e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																				
f. Evaluasi																				
g. Tindak lanjut hasil evaluasi																				
2021																				
2021																				
3)	Penyusunan dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen				a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan														
			b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan																	
			c. Penyusunan hasil jabatan																	
			d. Penerapan hasil pada jabatan																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SHPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				e. Evaluasi f. Tindaklanjut hasil evaluasi														
7)	Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)	Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
8)	Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)			2021												Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 170.000.000,00.	
9)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai	Dokumen rencana penempatan dan pola karier 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai b. Penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai c. Penerapan rencana penempatan dan pola karier d. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.
10)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	g. Tindaklanjut hasil evaluasi a. Penyusunan rencana Penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai b. Penyempurnaan Sistem Manajemen kinerja pegawai c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba														BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang mencrapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjut hasil evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.
12)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi b. Pelaksanaan sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.
13)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring														BKD	Rp. 100.000.000,00.
14)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														BKD	Rp. 80.000.000,00.
15)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM														BKD	Rp. 70.000.000,00.
16)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam reformasi Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan														BKD BPSDM	Rp. 80.000.000,00.

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Pemerintah Kabupaten Beryani		kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
2.	Penguatan Pengawasan			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
1)	Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 4 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 8 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
2)	Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 8 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP b. Sosialisasi														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
4)	Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjuti hasil evaluasi														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
5)	Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 9 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 130.000.000,00.
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi tertib administrasi														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00. Rp. 160.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 130.000.000,00.
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	
9)	Sosialisasi LHKPN	Presentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	Sosialisasi LHKPN														BKD Inspektorat	Rp. 160.000.000,00.
10)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Presentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN														BKD Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
11)	Penerapan wistle blower	% jumlah pengaduan yang ditindaklamiuti 70% (jika ada pengaduan yang masuk)	a. Tindak lanjut hasil monitoring a. Penyusunan rencana penerapan wistle blower b. Penyusunan pedoman pelaksanaan wistle blower c. Sosialisasi d. Penerapan wistle blower e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 270.000.000,00.
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi	% kegiatan yang	a. Tindak lanjut terhadap														Biro Organisasi	Rp.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	dilaksanakan sesuai target 80%	hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program penguatan pengawasan														Inspektorat SKPD	80.000.000,00.
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Beryani	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan																	
1)	Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, penzinaan, kesehatan, sarana dan prasarana)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 150.000.000,00.
2)	Identifikasi kebutuhan manajemen perbaikan pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3)	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan pemerataan akses pelayanan Pendidikan														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 80.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		70%	b. Pelaksanaan program pemberian beasiswa siswa miskin SMA/SMK ((sebagaimana dihasikan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)														Rp. 300.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														Rp. 100.000.000,00.
			d. Evaluasi														Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi														
4)	Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi guru														Rp. 80.000.000,00.
		70%	b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru														Rp. 160.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														Rp. 70.000.000,00.
			d. Evaluasi														Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi														
5)	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi kesehatan tenaga														Rp. 70.000.000,00.
6)		70%	b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi kesehatan tenaga														Rp. 200.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														Rp. 100.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
7)	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Evaluasi														Dinkes Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 3.500.000.000,00.		
			a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins																	
			b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																	
			c. Evaluasi																	
8)	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Tindak lanjut hasil evaluasi														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.		
			a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan																	
			b. Identifikasi user requirement																	
			c. Uji coba sistem																	
9)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Penerapan teknologi informasi														DPMPTSP Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 170.000.000,00.		
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
				2021																
				2021																

10) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p>	<p>Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 7.000.000.000,00.
11) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan bertahap peningkatan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peningkatan infrastruktur dasar</p>	<p>Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 500.000.000.000,00.
12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Melaksanakan monitoring perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik</p> <p>b. Evaluasi seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>		Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diakominfo SKPD	Rp. 160.000.000,00.
13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi		Perbaikan kegiatan-kegiatan program peningkatan kualitas pelayanan publik			Rp. 130.000.000,00.

<p>perbaikan berkelanjutan</p> <p>14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%</p>	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>																														<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD</p>	<p>Rp. 120.000.000,00.</p>
<p>4. Penguatan Akuntabilitas</p>																																	
<p>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p>	<p>a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya b. Review rencana strategis pemerintah daerah</p>																														<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p>	<p>a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>																														<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 110.000.000,00.</p>
<p>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p>	<p>Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>																														<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p>	<p>Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>																														<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 100.000.000,00.</p>
<p>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p>	<p>a. Pelaksanaan manajemen</p>																														<p>Bappeda</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>

	kinerja	kinerja	kinerja	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 80.000.000,00.
6)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang kinerjanya sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 170.000.000,00.
7)	Pengumpulan, perbaikan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja b. Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja c. Monitoring, perbaikan, dan pengelolaan data kinerja d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00.
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 150.000.000,00.
9)	Evaluasi terhadap seluruh	% kegiatan yang	Evaluasi terhadap seluruh	Biro	Rp. 150.000.000,00.

Kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	dilaksanakan sesuai target	kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 60.000.000,00.
10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindaklanjut evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00.
11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparaturdi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	% hasil mmonitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	b. Perbaikan kegiatan-program Penguatan Akuntabilitas a. Identifikasi kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penetapan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/ penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 100.000.000,00.
5. Quick Wins				
1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (lanjutan pelaksanaan quickwins)				
(1). Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin		a. Penyusunan rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin b. Rapat koordinasi dengan instansi terkait	Biro Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Humas Diskominfo	Rp. 600.000.000,00.
(2). Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		a. Beasiswa b. Pelaksanaan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		
c. Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK		a. Pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin		

6.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Integritas Menuju	WBK/WBBM	Penyusunan Inspektorat Provinsi sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Biro Organisasi Inspektorat	Rp.100.000.000,00
(1).	Penyusunan Inspektorat Provinsi sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	2	Penyiapan Provinsi sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		
(2).	Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	2	Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		Rp.150.000.000,00
(3).	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah provinsi Kalbar	70%	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat		Rp.150.000.000,00
(4).	Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	90%	a. Monitoring		Rp.100.000.000,00
(5).	Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	90%	b. Tindak lanjut monitoring	Inspektorat	Rp.100.000.000,00
(6).	Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi		
(7).	Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	b. Perbaikan terhadap sistem pelaksanaan berikutnya	Biro Organisasi	Rp.130.000.000,00
7.	Penataan Tatakelola			Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya		

1) Penyempurnaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Persentase tumpang tindih dan fungsi diselesaikan	kasus tugas yang	a. Penyusunan rencana bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Biro Organisasi	Rp. 120.000.000,00
			b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan		
			c. Penyusunan hasil pemetaan		
2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase tumpang tindih dan fungsi diselesaikan	kasus tugas yang	a. Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD (proses bisnis) atas dasar hasil pemetaan dan penataan organisasi (disinergikan dengan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi)	Biro Organisasi	Rp. 120.000.000,00
			b. Penerapan mekanisme kerja		
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring		
			d. Evaluasi hasil penerapan		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi		
3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	SOP	a. Penyusunan rencana SOP di masing-masing SKPD	Biro Organisasi	Rp. 120.000.000,00
			b. Penyusunan SOP di SKPD		
			c. Penerapan SOP di SKPD		
			d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring		
			e. Evaluasi hasil penerapan		
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi		
4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase tumpang tindih dan fungsi diselesaikan	kasus tugas yang	a. Penyusunan rencana pedoman diskresi	Biro Organisasi SKPD	Rp. 120.000.000,00
			b. Penerapan pedoman		
2021					
2021					

LAMPIRAN ROAD MAP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Penyempurnaan Jabatan Analisis	Dokumen hasil analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan Anjab														Biro Organisasi BKD	Rp. 125.000.000,00		
			b. Pelaksanaan Penyempurnaan Anjab																	
			c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																	
			d. Penerapan hasil pada jabatan																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindaklanjuti hasil evaluasi																	
			2022																	
2)	Penyempurnaan Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan ABK														Biro Organisasi BKD	Rp. 80.000.000,00		
			b. Pelaksanaan Penyempurnaan ABK																	
			c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																	
			d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindaklanjuti hasil evaluasi																	
			2022																	
3)	Penyusunan dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 60.000.000,00		
			b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan																	
			c. Penyusunan hasil pada jabatan																	
			d. Penerapan hasil pada jabatan																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindaklanjuti hasil evaluasi																	
			2022																	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			lanjut hasil monitoring	2022															
			f. Evaluasi	2022															
			g. Tindak lanjut evaluasi	2022															
4)	Penyusunan Kebutuhan Diklat	Analisis kebutuhan pegawai	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyusunan kebutuhan pegawai															Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai																
			c. Penerapan hasil pada rekrutmen																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2022															
5)	Assesment individu berdasarkan kinerja	Laporan individu	a. Penyusunan rencana asesment individu berdasarkan kinerja															BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
		1 dokumen	b. Pelaksanaan Asesment individu berdasarkan kinerja																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2022															
6)	Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	%pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyusunan rencana sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu															BKD BPSDM Biro Organisasi	Rp. 150.000.000,00.
		80%	b. Penentuan jabatan yang akan dibuka																
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjut evaluasi hasil														BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.
12)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi b. Pelaksanaan sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi														BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.
13)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring														BKD	Rp. 100.000.000,00.
14)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														BKD	Rp. 80.000.000,00.
15)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM														BKD	Rp. 70.000.000,00.
16)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam reformasi Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan														BKD BPSDM	Rp. 80.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Duluan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Pemerintah Kabupaten Beryani		kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
2.	Penguatan Penguasaan			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 4 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 8 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)																Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
	3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SIPP	% SKPD yang menerapkan SIPP	a. Penyusunan rencana penerapan SIPP														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
		70%	b. Sosialisasi															
	4) Penerapan SIPP	% SKPD yang menerapkan SIPP	a. Penerapan SIPP di SKPD														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
		70%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 9 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 150.000.000,00.
	7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi tertib administrasi														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 160.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 130.000.000,00.
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	
9)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	Sosialisasi LHKPN														BKD Inspektorat	Rp. 160.000.000,00.
10)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN														BKD Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
11)	Penerapan wistle blower	80% % jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 70% (jika ada yang pengaduan masuk)	a. Tindak lanjut hasil monitoring a. Penyusunan rencana penerapan wistle blower b. Penyusunan pedoman pelaksanaan wistle blower c. Sosialisasi d. Penerapan wistle blower e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 270.000.000,00.
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi	% kegiatan yang	a. Tindak lanjut terhadap														Biro Organisasi	Rp.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	dilaksanakan sesuai target 80%	hasil monitoring dan evaluasi														Inspektorat SKPD	80.000.000,00.
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Beryani	% hasil monitoring dan evaluasi yang diindikasikan melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, penzinaan, kesehatan, sarana dan prasarana)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	<p>a. Penyusunan rencana survey kepuasan terhadap seluruh jenis pelayanan</p> <p>b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya</p> <p>c. Pelaksanaan survey</p> <p>d. Pengolahan data dan analisis hasil survey</p> <p>e. Penyusunan rekomendasi</p>														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 150.000.000,00.
2)	Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3)	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan pemerataan akses pelayanan Pendidikan														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 80.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		70%	<p>b. Pelaksanaan program pemberian beasiswa siswa miskin SMA/SMK ((sebagaimana dihasikan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi</p>															Rp. 300.000.000,00.
			<p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi</p>															Rp. 100.000.000,00.
			<p>d. Evaluasi</p>															Rp. 100.000.000,00.
			<p>e. Tindaklanjut hasil evaluasi</p>															
4)	Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	<p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>70%</p>	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi guru</p> <p>b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi</p> <p>e. Tindaklanjut hasil evaluasi</p>															Rp. 80.000.000,00.
			<p>b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi</p> <p>e. Tindaklanjut hasil evaluasi</p>															Rp. 160.000.000,00.
			<p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi</p> <p>e. Tindaklanjut hasil evaluasi</p>															Rp. 70.000.000,00.
			<p>d. Evaluasi</p> <p>e. Tindaklanjut hasil evaluasi</p>															Rp. 100.000.000,00.
5)	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	<p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>70%</p>	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p>															Rp. 70.000.000,00.
			<p>b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p>															Rp. 200.000.000,00.
6)			<p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p>															Rp. 100.000.000,00.

10) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara</p>	<p style="text-align: center;">Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 7.000.000.000,00.
11) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait</p> <p>c. Pelaksanaan bertahap peningkatan infrastruktur mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peningkatan infrastruktur dasar</p>		<p style="text-align: center;">Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023</p>	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat
12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	<p>a. Melaksanakan monitoring dan perencanaan pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik</p> <p>b. Evaluasi seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>			Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD
13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi		Perbaikan kegiatan-kegiatan program peningkatan kualitas pelayanan publik			Rp. 130.000.000,00.

<p>perbaikan berkelanjutan</p> <p>14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%</p>	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diakominfo SKPD</p>	<p>Rp. 120.000.000,00.</p>
<p>4. Penguatan Akuntabilitas</p>	<p>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyusunan rencana renstra dan perbaikannya</p> <p>b. Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Rp. 90.000.000,00.</p> <p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p> <p>b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p> <p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 110.000.000,00.</p>
<p>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 100.000.000,00.</p>
<p>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas</p>	<p>a. Pelaksanaan manajemen</p>	<p>Bappeda</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>

	kinerja	kinerja	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 80 000 000,00
6)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	<p>b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>c. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi</p> <p>a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)</p> <p>b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>c. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 170 000 000,00
7)	Pengumpulan, perbaikan, dan pengelolaan data kinerja	<p>B</p> <p>Prosentase pegawai capaian kerjanya sesuai target</p> <p>70%</p> <p>Nilai kinerja</p> <p>B</p>	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60 000 000,00
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	<p>% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target</p> <p>80%</p>	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 150 000 000,00
9)	Evaluasi terhadap seluruh	<p>% kegiatan yang</p> <p>Evaluasi terhadap seluruh</p>	Biro	Rp. 150 000 000,00

Kegiatan pada Penguatan Akuntabilitas	dilaksanakan sesuai target	kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 60.000.000,00
10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindaklanjut evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00
11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparaturdi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	80%	b. Perbaikan kegiatan program Penguatan Akuntabilitas	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 100.000.000,00.
1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (lanjutan pelaksanaan quickwins)	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi		
(1). Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin	100%	b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya		
(2). Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa		a. Penyusunan rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin b. Rapat koordinasi dengan instansi terkait	Biro Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Humas Diskominfo	Rp. 600.000.000,00.
c. Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK		a. Sosialisasi Program Beasiswa b. Pelaksanaan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa a. Pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin		

(6). Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan sistem pelaksanaan tahun berikutnya	Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya	Biro Organisasi	Rp.130.000.000,00
(7). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 70%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan sistem pelaksanaan tahun berikutnya	Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya	Biro Organisasi	Rp.120.000.000,00
7. Penataan Tataaksana					
1) Penyempurnaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 80%	a. Penyusunan rencana Penyempurnaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan Pemetaan proses penyelenggaraan pemerintahan b. Pelaksanaan Penyempurnaan pemetaan c. Penyusunan hasil Penyempurnaan pemetaan	Biro Organisasi	Rp.120.000.000,00	
2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD (proses bisnis) atas dasar hasil pemetaan dan penataan organisasi (disinergikan dengan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi) b. Penerapan mekanisme kerja c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi	Biro Organisasi	Rp.120.000.000,00	2022
3) Penyusunan/perbaikan SOP	Prosentase SOP	a. Penyusunan rencana	Biro	Rp.120.000.000,00	2022

(termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	perbaikan SOP di masing-masing SKPD	2022												Organisasi	Rp. 120.000.000,00		
4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 80%	b. Penyusunan SOP di SKPD															Biro Organisasi SKPD	Rp. 120.000.000,00
		c. Penerapan SOP di SKPD																
		d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																
		e. Evaluasi hasil penerapan																
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi																
		a. Penyusunan rencana pedoman diskresi																
5) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 40%	b. Penerapan pedoman diskresi															Biro Organisasi Dinas Kominfo SKPD	Rp. 150.000.000,00
		c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																
		d. Evaluasi hasil penerapan																
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
		a. Identifikasi user requirement untuk semua jenis pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya																
6) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit dan e-procurement)	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 40%	b. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (fokus pada e-audit dan e-procurement)															Biro Organisasi Dinas Kominfo SKPD	Rp. 300.000.000,00
		c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																

2022													
d. Evaluasi hasil penerapan													
e. Tindak lanjut hasil evaluasi													
7) Penerapan keterbukaan informasi publik	a. Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%									Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Humas	Rp.150.000.000,00
	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring												
	c. Evaluasi hasil penerapan												
	d. Tindak lanjut hasil evaluasi												
8) Penerapan pelayanan akses internet gratis	a. Penerapan pelayanan akses internet gratis	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	10									Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Humas	Rp.150.000.000,00
	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring												
	c. Evaluasi hasil penerapan												
	d. Tindak lanjut hasil evaluasi												
9) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80%									Biro Organisasi Inspektorat	Rp.100.000.000,00
	b. Tindak lanjut hasil monitoring												
10) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80%									Biro Organisasi Inspektorat	Rp.150.000.000,00
	b. Tindak lanjut hasil monitoring												
11) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2019	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80%									Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Humas	
	b. Perbaikan kegiatan-program Penataan Tatalaksana												
12) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	100%									Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Humas	Rp.100.000.000,00
	b. Penyusunan prioritas												

<p>kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>		<p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>	
<p>8. Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung 3 (tiga) prioritas area perubahan yaitu peningkatan SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik</p>	<p>% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundang yang dipandang menghambat pelayanan publik 60%</p>	<p>a. Identifikasi berbagai peraturan perundang daerah yang dipandang menghambat pelayanan publik b. Penyusunan rencana pembaharuan penataan c. Perumusan kebijakan untuk perubahan peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP d. Penetapan kebijakan e. Implementasi</p>	<p>Biro Hukum Biro Organisasi</p>
<p>9. Penguatan dan Penataan Organisasi 1) Penerapan Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung 3 (tiga) prioritas area perubahan yaitu peningkatan SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik</p>	<p>Jumlah organisasi yang ditata 60%</p>	<p>a. Penerapan Penataan organisasi: b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis</p>	<p>Biro Organisasi Biro Hukum</p>
<p>2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih</p>	<p>Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan</p>		<p>Biro Organisasi</p>

LAMPIRAN ROAD MAP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Penyempurnaan Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan Anjab														Biro Organisasi BKD	Rp. 125.000.000,00			
			b. Pelaksanaan Penyempurnaan Anjab																		
			c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																		
			d. Penerapan hasil pada jabatan																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi																		
			2023																		
			2)	Penyempurnaan Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Penyempurnaan ABK															
b. Pelaksanaan Penyempurnaan ABK																					
c. Penyusunan Hasil Penyempurnaan																					
d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai																					
e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																					
f. Evaluasi																					
g. Tindaklanjut hasil evaluasi																					
2023																					
3)	Penyusunan dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen				a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 60.000.000,00
			b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan																		
			c. Penyusunan hasil																		
			d. Penerapan hasil pada jabatan																		
			e. Monitoring dan tindak																		
			2023																		

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran		
				2023															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			<p>lanjut hasil monitoring hasil</p> <p>f. Evaluasi</p> <p>g. Tindak lanjut evaluasi</p>																
4)	Penyusunan Kebutuhan Diklat	Analisis Dokumen rencana kebutuhan pegawai 1 dokumen	<p>a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai</p> <p>b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai</p> <p>c. Penerapan hasil pada rekrutmen</p> <p>d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>e. Evaluasi</p> <p>f. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>															Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
5)	Assesment individu berdasarkan kinerja	Laporan individu kinerja 1 dokumen	<p>a. Penyusunan rencana Assessment individu berdasarkan kinerja</p> <p>b. Pelaksanaan Assessment individu berdasarkan kinerja</p> <p>c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>															BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.
6)	Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	%pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%	<p>a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu</p> <p>b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka</p> <p>c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda</p> <p>d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring</p>															BKD BPSDM Biro Organisasi	Rp. 150.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			e. Evaluasi f. Tindaklanjut evaluasi a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai														Biro Organisasi BKD BPSDM	Rp. 100.000.000,00.	
				2023															
			a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai c. Penerapan rencana penempatan dan pola karier d. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi															BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.
				2023															
			a. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai b. Penyempurnaan Sistem Manajemen kinerja pegawai c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba															BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.
7)	Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)	Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen																	
8)	Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)																		
9)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai	Dokumen rencana penempatan dan pola karier 1 dokumen																	
10)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem																	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai													BKD BPSDM	Rp. 120.000.000,00.	
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindaklanjut hasil evaluasi															
12)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi													BKD BPSDM	Rp. 150.000.000,00.	
			b. Pelaksanaan sosialisasi															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi															
13)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM												BKD	Rp. 100.000.000,00.		
			b. Tindak lanjut hasil monitoring															
14)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM												BKD	Rp. 80.000.000,00.		
15)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi												BKD	Rp. 70.000.000,00.		
			b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM															
16)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi												BKD BPSDM	Rp. 80.000.000,00.		
			b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan															

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Pemerintah Kabupaten Beryani		kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
2.	Penguatan Pengawasan			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 4 dalam Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 8 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)																Biro Organisasi Inspektorat BKD	Rp. 100.000.000,00.
	3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Penyusunan rencana penerapan SPIP														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
		70%	b. Sosialisasi															
	4) Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Penerapan SPIP di SKPD														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
		70%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindaklanjut hasil evaluasi															
	5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 9 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														
	6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana														Biro Organisasi Inspektorat	Rp. 150.000.000,00.
	7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi administrasi tertib														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 160.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD b. Tindak lanjut hasil monitoring														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 130.000.000,00.
9)	Sosialisasi LHKPN	WTP Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	Sosialisasi LHKPN														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
10)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN														BKD Inspektorat SKPD	Rp. 150.000.000,00.
11)	Penerapan wistle blower	80% % jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 70% (jika ada yang pengaduan masuk)	a. Tindak lanjut hasil monitoring a. Penyusunan rencana penerapan wistle blower b. Penyusunan pedoman pelaksanaan wistle blower c. Sosialisasi d. Penerapan wistle blower e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 270.000.000,00.
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Biro Organisasi Inspektorat SKPD	Rp. 100.000.000,00.
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi	% kegiatan yang	a. Tindak lanjut terhadap														Biro Organisasi	Rp.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	dilaksanakan sesuai target 80%	hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program penguatan pengawasan														Inspektorat SKPD	80.000.000,00.
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Kabupaten Beryani	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Pencapaian kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 150.000.000,00.
2)	Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
3)	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Penyusunan rencana peningkatan pemerataan akses pelayanan Pendidikan														Dimas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 80.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		70%	b. Pelaksanaan program pemberian beasiswa siswa miskin SMA/SMK ((sebagaimana dihasikan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)															Rp. 300.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															Rp. 100.000.000,00.
			d. Evaluasi															Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi															
4)	Peningkatan kompetensi guru (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi guru b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi															Rp. 80.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi															Rp. 160.000.000,00.
			a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi kesehatan tenaga															Rp. 70.000.000,00.
			d. Evaluasi															Rp. 100.000.000,00.
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi															
5)	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (diintegrasikan dengan program peningkatan sumber daya manusia)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi kesehatan tenaga															Rp. 70.000.000,00.
			b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi kesehatan															Rp. 200.000.000,00.
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															Rp. 100.000.000,00.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7)	Peningkatan sarana kesehatan dan prasarana kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Evaluasi													Dinkes Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 3.500.000.000,00.
			a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 5) sebagai Quick wins)														
			b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			c. Evaluasi														
8)	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	d. Tindak lanjut hasil evaluasi													Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 100.000.000,00.
			a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan														
			b. Identifikasi user requirement														
			c. Uji coba sistem														
			d. Penerapan teknologi informasi														
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			f. Evaluasi														
9)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70%	g. Tindak lanjut hasil evaluasi													DPMPTSP Biro Organisasi Biro Humas Diskominfo SKPD	Rp. 170.000.000,00.
			a. Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2														
			b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														

10) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait c. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara	Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat	Rp. 7.000.000.000,00.
11) Peningkatan layanan infrastruktur dasar mencakup ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dasar ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait c. Pelaksanaan bertahap peningkatan infrastruktur dasar ketenagalistrikan, air bersih, serta akses jalan dan jembatan d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peningkatan infrastruktur dasar		Dilaksanakan berkelanjutan 2019 - 2023	Dinas PUPR Bappeda Inspektorat
12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik b. Evaluasi seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD
13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi		Perbaikan kegiatan-kegiatan program peningkatan kualitas pelayanan publik			Rp. 130.000.000,00.

<p>perbaikan berkelanjutan</p> <p>14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru</p> <p>100%</p>	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Diskominfo SKPD</p>	<p>Rp. 120.000.000,00.</p>
<p>4. Penguatan Akuntabilitas</p> <p>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya</p> <p>b. Review rencana strategis pemerintah daerah</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 90.000.000,00.</p>
<p>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja</p> <p>b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 110.000.000,00.</p>
<p>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>
<p>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>B</p>	<p>Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah</p>	<p>Rp. 100.000.000,00.</p>
<p>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja</p>	<p>a. Pelaksanaan manajemen</p>	<p>Bappeda</p>	<p>Rp. 150.000.000,00.</p>

	kinerja	kinerja	kinerja	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 80.000.000,00
6)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 170.000.000,00.
7)	Penggumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana pengumpulan, dan pengeloaan data kinerja b. Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja c. Monitoring Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00. Rp. 80.000.000,00. Rp. 60.000.000,00.
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 	Biro Organisasi Inspektorat Daerah	Rp. 150.000.000,00.
9)	Evaluasi terhadap seluruh	% kegiatan yang	Evaluasi terhadap seluruh	Biro	Rp. 150.000.000,00.

kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	dilaksanakan sesuai target	kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Organisasi Inspektorat Daerah	Rp.
10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	80%	a. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 60.000.000,00.
11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam reformasi birokrasi program Penguatan Akuntabilitas Aparaturdi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	100%	b. Perbaikan kegiatan-program Penguatan Akuntabilitas a. Identifikasi sebagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Pencatapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat Daerah BKD SKPD	Rp. 100.000.000,00.
5. Quick Wins				
1) Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin (lanjutan quickwins) Menyusun rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin		a. Penyusunan rencana pelaksanaan program beasiswa SMA/SMK untuk siswa miskin b. Rapat koordinasi dengan instansi terkait a. Sosialisasi Program Beasiswa b. Pelaksanaan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa a. Pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin	Biro Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Humas Diakominfo	Rp. 600.000.000,00.
2) Melaksanakan seleksi siswa yang memenuhi syarat menerima beasiswa				
c. Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada siswa yang lolos seleksi penerima beasiswa miskin SMA/SMK				

(6). Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkesinambungan.		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan sistem pelaksanaan tahun berikutnya									Rp.130.000.000,00
(7). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 70%	Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM									Rp.120.000.000,00
7. Penataan Tataaksana												
1) Penyempurnaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 80%	a. Penyusunan rencana Penyempurnaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan b. Pelaksanaan Penyempurnaan pemetaan c. Penyusunan hasil Penyempurnaan pemetaan									Rp.120.000.000,00
2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD		Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD (proses bisnis) atas dasar hasil pemetaan dan penataan organisasi (disinergikan dengan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi) b. Penerapan mekanisme kerja c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi									Rp.120.000.000,00
3) Penyusunan/perbaikan SOP		Presentase SOP	a. Penyusunan rencana									Rp.120.000.000,00

2023

2023

		2023															
		d. Evaluasi hasil penerapan															
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
7)	Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik 70%															Rp.150.000.000,00
		a. Penerapan keterbukaan informasi publik															
		b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
		c. Evaluasi hasil penerapan															
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
8)	Penerapan pelayanan akses internet gratis	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis															Rp.150.000.000,00
		a. Penerapan pelayanan akses internet gratis															
		b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
		c. Evaluasi hasil penerapan															
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
9)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%															Rp.100.000.000,00
		a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		b. Tindak lanjut hasil monitoring															
10)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%															Rp.150.000.000,00
		Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana															
11)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2019	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%															
		a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		b. Perbaikan kegiatan-program Penataan Tatalaksana															
		a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
		b. Penyusunan prioritas															
12)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%															Rp.100.000.000,00
		a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
		b. Penyusunan prioritas															

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Beryani yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi

oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Beryani yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

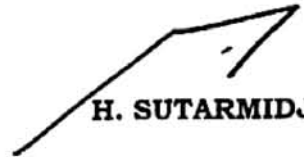
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2019 – 2023 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI